



KECAMATAN SUKODONO

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022



Kantor Kecamatan Sukodono

Jl. Raya Bukit Kweni, Anggaswangi, Sukodono
email : sukodono@sidoarjokab.go.id
telp : 031 99036539



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO

Jl. Bukit Kweni Desa Anggaswangi

Telepon. (031) 99036539

Email : sukodono@sidoarjokab.go.id Website : sukodono.sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Kecamatan Sukodono Tahun 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 28 Februari 2023

Camat Sukodono



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN

NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP . 196811021990031003

}

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan LAKIP Kecamatan Sukodono Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Kecamatan Sukodono ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sukodono sebagai instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Laporan ini merupakan sarana mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Kecamatan Sukodono yang diamanahkan negara selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono serta Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2021-2026.

LAKIP ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal – hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang. Akhir kata, mudah – mudahan LAKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Sukodono pada masa yang akan datang.

Sidoarjo, 28 Februari 2023

Camat Sukodono



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN
NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP . 196811021990031003

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. KEDUDUKAN.....	3
.....	4
1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	5
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Visi dan Misi.....	7
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	8
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	9
2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2022.....	11
BAB III.....	14
AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.3. Pengukuran Kinerja.....	14
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	15
3.2.1. Sasaran pertama meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	15
3.2.2. Sasaran Kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.....	20
3.3. Realisasi Anggaran.....	32
1.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33
BAB IV.....	35
PENUTUP.....	35
4.1. Kesimpulan.....	35
BAB V.....	36
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	36



A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	36
B. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022.....	36
C. Pohon Kinerja yang Menunjang Sasaran Kinerja 2022.....	36





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan.....	4
Tabel 1. 2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah.....	5
Tabel 2. 1 Penjabaran Misi RPJMD Kab. Sidoarjo yang diampu Kecamatan Sukodono....	7
Tabel 2. 2 Keterkaitan misi RPJMD kabupaten sidoarjo dengan rencana strategis Kecamatan sukodono.....	9
Tabel 2. 3 Sasaran Utama Perjanjian Kinerja 2022.....	9
Tabel 2. 4 Sasaran Utama Perjanjian Kinerja 2022.....	9
Tabel 2. 5 Anggaran Kecamatan Sukodono Tahun 2022.....	11
Tabel 3. 1 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja.....	14
Tabel 3. 2 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja.....	15
Tabel 3. 3 Realisasi kinerja sasaran 1 Tahun 2022.....	16
Tabel 3. 4 Tabel Indikator Kinerja sasaran kedua beserta definisi operasional.....	16
Tabel 3. 5 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten.....	17
Tabel 3. 6 Perkembangan kinerja sasaran Kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2021-2022.....	18
Tabel 3. 7 Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terhadap target akhir Renstra.....	18
Tabel 3. 8 Realisasi kinerja program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1.....	19
Tabel 3. 9 Realisasi kinerja sasaran 1 Tahun 2022.....	20
Tabel 3. 10 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Kedua beserta definisi operasional.....	21
Tabel 3. 11 Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2021-2022.....	22
Tabel 3. 12 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten.....	25
Tabel 3. 13 Realisasi kinerja program dan kegiatan yang mendukung sasaran 2.....	29
Tabel 3. 14 Realisasi kinerja dan Anggaran program berdasarkan sasaran.....	30
Tabel 3. 15 Realisasi kinerja dan keuangan.....	32
Tabel 3. 16 Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono.....	4
Gambar 1. 2 Diagram Komposisi Aparatur Kecamatan Sukodono.....	4
Gambar 3. 1 Realisasi kinerja sasaran pertama ketentraman dan ketertiban umum....	16
Gambar 3. 2 Grafik Perkembangan kinerja sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2021-2022.....	18
Gambar 3. 3 Perkembangan Realisasi dibandingkan dengan target jangka menengah.	18
Gambar 3. 4 Realisasi kinerja sasaran Kedua.....	20
Gambar 3. 5 Grafik Perkembangan kinerja Nilai SKM Tahun 2021-2022.....	23
Gambar 3. 6 Perkembangan kinerja Nilai SAKIP Tahun 2021-2022.....	23
Gambar 3. 7 Perkembangan kinerja Nilai RB Tahun 2021-2022.....	23
Gambar 3. 8 Perkembangan realisasi nilai IPP Tahun 2021-2022.....	24
Gambar 3. 9 Komparasi Nilai SKM Tahun 2022.....	25
Gambar 3. 10 Komparasi Realisasi Nilai SAKIP 2022.....	25
Gambar 3. 11 Komparasi Realisasi Nilai RB.....	26
Gambar 3. 12 Komparasi Nilai IPP.....	26
Gambar 3. 13 Komparasi Serapan Anggaran.....	26
Gambar 3. 14 Perkembangan Realisasi SKM dibandingkan dengan target jangka menengah.....	27
Gambar 3. 15 Perkembangan Realisasi Nilai SAKIP dibandingkan dengan target jangka menengah.....	27
Gambar 3. 16 Perkembangan Realisasi RB dibandingkan dengan target jangka menengah.....	28
Gambar 3. 17 Perkembangan Realisasi IPP dibandingkan dengan target jangka menengah.....	28
Gambar 3. 18 Perkembangan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan target jangka menengah.....	28

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun awal Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2022-2026, dalam kurun waktu satu tahun Kecamatan Sukodono melaksanakan beberapa kegiatan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan peraturan bupati nomor 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo yang terakhir dirubah dengan peraturan bupati sidoarjo nomor 10 tahun 2017. Disamping itu, Kecamatan juga mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari bupati berdasarkan peraturan bupati sidoarjo nomor 22 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono pada tahun 2022 meliputi :

1. Pembersihan saluran dari sampah, eceng gondok dan benda – benda lain yang mengurangi fungsi saluran air;
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa terkait APBDes, pungutan, tata ruang dan Organisasi pemerintah desa.
3. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa.
4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa.
5. Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan kepala desa (pilkades), perangkat desa dan BPD.
6. Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD.
7. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran keuangan desa setiap triwulan.
8. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa.
9. Legalisasi salinan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Rekam dan Cetak KTP Elektronik.
11. Entry dan Cetak Kartu Keluarga.
12. Pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak).Administrasi Kependudukan dan Pencatata Sipil
13. Pelayanan dan penandatanganan AK I (Kartu Kuning).
14. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar tanpa Sertifikat
15. Pelaksanaan Kegiatan Cipta Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan melalui Forkopimka (Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan).
16. Penertiban reklame isidentil diwilayah kecamatan setempat.
17. Rehabilitasi Jalan Lingkungan.

untuk kewenangan Penerbitan dan penandatanganan IMB rumah tinggal satu dan dua lantai dengan maksimal luas bangunan 400 m2 (empat ratus meter persegi) non rumah tingkat dan non perumahan tidak dilaksanakan pada tahun 2022 karena kewenangan tersebut dihapus oleh pemerintah pusat .



dalam melaksanakan kewenangan dan mencapai sasaran Kecamatan Sukodono sesuai dengan Rencana Strategis 2022-2026, pada tahun 2022 Kecamatan Sukodono melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk capaian sasaran, program akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KEDUDUKAN

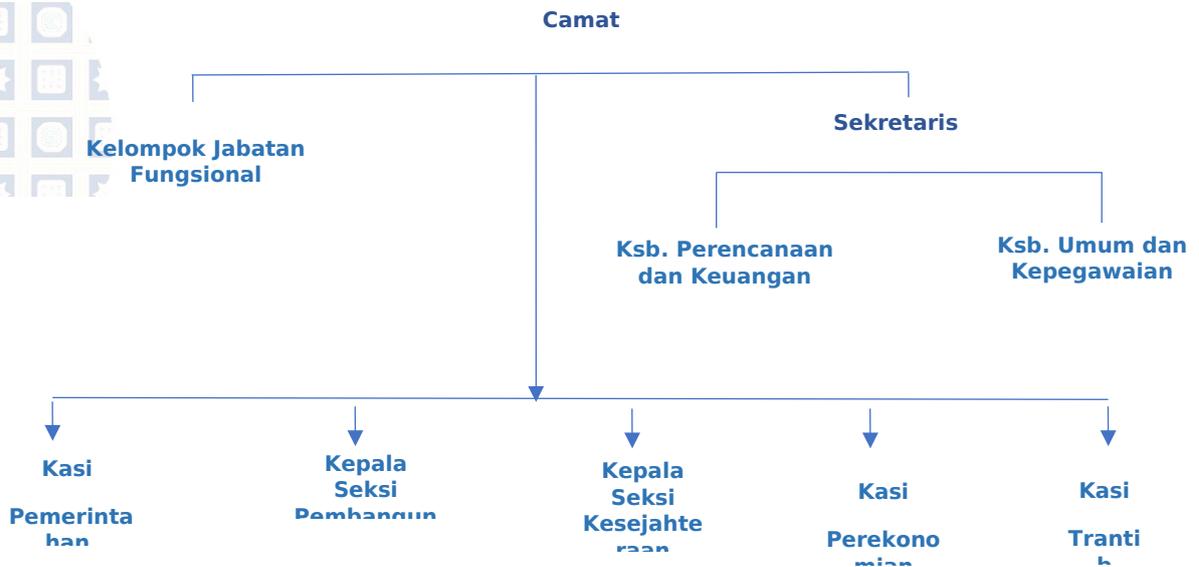
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
10. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

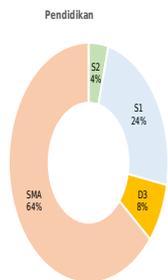
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono



Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 21 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Tabel 1. 1 Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Administrator	1
3	Pengawas	5
4	Pelaksana	13
5	Jabatan Fungsional	1



Gambar 1. 2 Diagram Komposisi Aparatur Kecamatan Sukodono

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sukodono per 31 Desember 2022 berjumlah 22 orang, dengan rincian 20 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk menunjang pelaksanaan kinerja Kecamatan Sukodono, maka kami merekrut 22 orang pegawai Non ASN pada formasi tenaga administrasi pelayanan, tenaga administrasi keuangan, banpol PP, tenaga kebersihan.

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan Sukodono tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Sukodono	Belum adanya informasi terkait rencana struktur pola ruang yang diinformasikan melalui website maupun ruang pelayanan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Sukodono
	Masih adanya potensi Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang belum memiliki izin	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB	<ul style="list-style-type: none"> a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB b. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
	Masih adanya potensi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB
	Masih sedikit jumlah desa yang termasuk dalam kategori desa maju	Adanya persepsi negative desa terhadap indeks desa membangun. Perangkat desa memilih untuk tidak menaikkan status menjadi desa mandiri untuk menghindari berkurangnya ADD	<ul style="list-style-type: none"> a. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun b. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat menjadi desa maju

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah
- b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR
- c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Sukodono
- d. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB
- e. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
- f. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB
- g. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun.
- h. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat menjadi desa maju

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi "Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dijelaskan dalam tabel di bawah:

Tabel 2. 1 Penjabaran Misi RPJMD Kab. Sidoarjo yang diampu Kecamatan Sukodono

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas Yang Mendukung Kemudahan Berusaha. <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Sasaran 2 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital. <i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>
Misi 5 RPJMD : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Tujuan2 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketenteraman dalam masyarakat. <i>Indeks Kesalehan Sosial</i>	Sasaran 2 : Terciptanya kondisi Masyarakat yang aman, nyaman dan tentram. <i>Indeks Rasa Aman</i>

RPJMD tahun 2021-2026 memiliki program prioritas kepala daerah terpilih sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru;
2. Bpjs Kesehatan Gratis Seluruh Warga;
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin ;
4. 10.000 Beasiswa Kuliah;
5. Insentif Plus Guru Ngaji Dan Guru Agama ;
6. Rp. 5 Juta-50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan ;
7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi Rt ;
8. 20.000 Umkm Naik Kelas ;
9. Penataan Kota Dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan ;



10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Dan Kader Posyandu ;
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, Dan Tenaga Honorer;
12. *Youth Center*, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda;
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi ;
14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera ;
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat ;
16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif ;
17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah ;

Dari semua program unggulan di atas, kecamatan sukodono bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi, sehingga memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran dari RPJMD. Penjelasan keterkaitan antara visi, misi dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran beserta Indikator kinerjanya pada Rencana Strategis Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Keterkaitan misi RPJMD kabupaten sidoarjo dengan rencana strategis Kecamatan sukodono

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Kec. Sukodono	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Sasaran 2 : Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha <i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, ketentraman dan Ketertiban umum <i>Nilai SKM Kecamatan</i>	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai SKM Kecamatan 2. Nilai SAKIP 3. Nilai RB 4. Nilai IPP 5. Prosentase Penyerapan Anggaran
Misi 5 RPJMD : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Tujuan2 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketenteraman dalam masyarakat. <i>Indeks Kesalehan Sosial</i>	Sasaran 2 : Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram <i>Indeks Rasa Aman</i>		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sukodono Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

I. SASARAN UTAMA

Tabel 2. 3 Sasaran Utama Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran Utama	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	73%

II. SASARAN TAMBAHAN

Tabel 2. 4 Sasaran Utama Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran Tambahan	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian
----	------------------	---------------------------	---------

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Sukodono	90,50(Sangat Baik)
	Nilai SAKIP Kecamatan Sukodono	80,10(A)
	Nilai RB	36,30
	Nilai IPP	4,51(A)
	Prosentase Penyerapan Anggaran	90%

- a. Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Prosentase Permasalahan Trantibum yang Difasilitasi 73% dengan pertimbangan realisasi kinerja atas fasilitasi permasalahan trantibum adalah 100% , dan target di Renstra tahun 2022 sebesar 100%.
- b. Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Nilai SKM Kecamatan Sukodono ditetapkan target sebesar 90,50 (sangat baik), dengan pertimbangan tingkat capaian pada tahun 2021 adalah **97,89** dan target di Renstra tahun 2022 sebesar 90,50.
- c. Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Nilai SAKIP Kecamatan Sukodono ditetapkan target sebesar A (80,10) dengan pertimbangan tingkat capaian pada tahun 2021 adalah **78,61** dan target di Renstra tahun 2022 sebesar 80,10. sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 1,49. (dikurangi target 2022-realisasi 2021)
- d. Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Nilai RB Kecamatan Sukodono ditetapkan target sebesar 36,30 dengan pertimbangan tingkat capaian pada tahun 2021 adalah **36,30** dan target di Renstra tahun 2022 sebesar 36,30. sehingga target kinerja tahun 2022 adalah mempertahankan nilai yang sudah didapat.
- e. Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Nilai IPP Kecamatan Sukodono ditetapkan target sebesar A (4,51) dengan pertimbangan tingkat capaian pada tahun 2021 adalah **4,07** dan target di Renstra tahun 2022 sebesar 4,51 sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 4,44 (dikurangi target 2022-realisasi 2021).
- f. Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Persentase serapan anggaran , Kecamatan Sukodono ditetapkan target sebesar 90% dengan pertimbangan tingkat capaian pada tahun 2021 adalah **94,04** dan target di Renstra tahun 2022 sebesar 90%., sehingga target kinerja tahun 2022 meningkatkan penyerapan anggaran, meminimalisir SILPA.

2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 6.820.274.409. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.510.413.923 dengan rincian sebagai mana tabel di bawah.

Tabel 2. 5 Anggaran Kecamatan Sukodono Tahun 2022

Tujuan	sasaran	Program	Subkegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	PROGRA M	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	104.802.160	92.090.260	
		KOORDINASI	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30.511.600	30.511.600	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.800.000	3.800.000	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	PROGRA M	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.184.920	1.184.920
			PENUNJANG URUSAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.278.200.913	3.223.011.717
			PEMERINTAHAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	299.860	299.860
			TAHAN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0
			DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.575.550	4.880.550
			KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.499.160	21.613.925
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.800.000	91.800.000
				Penyediaan Barang	6.015.900	6.015.900

Tujuan	sasaran	Program	Subkegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
			Cetakan dan Penggandaan		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.432.000	3.432.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.746.000	69.615.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.351.881	93.996.501
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.014.900	0
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.000.000	219.000.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.887.600	215.987.600
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.208.868.200	1.194.263.200
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.000.000	27.500.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	43.500.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.206.620	39.000.000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.500.000	20.000.000
		PROGRA M PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	384.471.173	361.996.173
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	101.304.750	61.698.500
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.408.945	7.408.945
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14.138.100	0
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	643.547.230	605.179.555

Tujuan	sasaran	Program	Subkegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
			dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	55.547.717	55.547.717
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.059.230	9.880.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.600.000	5.700.000
				6.820.274.409	6.510.413.923

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 < 90	Baik
3	70,01 < 80	Cukup
4	0 < 70,01	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	136,98%	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	99,74%	Sangat Baik

Masing masing sasaran strategis didukung oleh indikator kinerja yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, didukung oleh indikator kinerja utama: Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi. Indikator sasaran ini bisa tercapai diatas ekspektasi karena respon cepat oleh petugas keamanan dan ketertiban umum (satpol PP) dengan sinergi Bersama polsek daan koramil kecamatan Sukodono;
2. Sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, didukung oleh indicator kinerja utama: Nilai SKM Kecamatan Sukodono,Nilai SAKIP Kecamatan Sukodono,Nilai RB Kecamatan Sukodono, Nilai IPP Kecamatan Sukodono, Prosentase Penyerapan Anggaran Kecamatan Sukodono. Capaian kinerja sasaran kedua belum maksimal dikarenakan beberapa realisasi indikator kinerja utama pada tahun 2022 tidak memenuhi target;

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

3.2.1. Sasaran pertama meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam sasaran kedua untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 73% Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran kedua beserta dengan anggarannya

Tabel 3.3 Realisasi kinerja sasaran 1 Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	73%	100%	136,98 %	126,401,860	44,912,200	35.53 %

Gambar 3.1 Realisasi kinerja sasaran pertama ketentraman dan ketertiban umum



Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator. Dengan definisi operasional dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tabel Indikator Kinerja sasaran kedua beserta definisi operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Sukodono melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Sukodono}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi}} * 100\%$

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan polsek dan koramil dalam rangka meningkatkan Keadaan Lingkungan yang kondusif di wilayah Kecamatan Sukodono.
2. Melaksanakan pembinaan kepada desa melalui kasi maupun subbagian yang ada di Kecamatan Sukodono

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Sukodono berdekatan dengan Kota Surabaya, dan sehingga banyak terdapat potensi terjadinya konflik sosial, horizontal dalam masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kecamatan se- Kabupaten Sidoarjo, Capaian Kinerja Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sukodono relatif sama . Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten.

Tabel 3. 5 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Kabupaten
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	100%

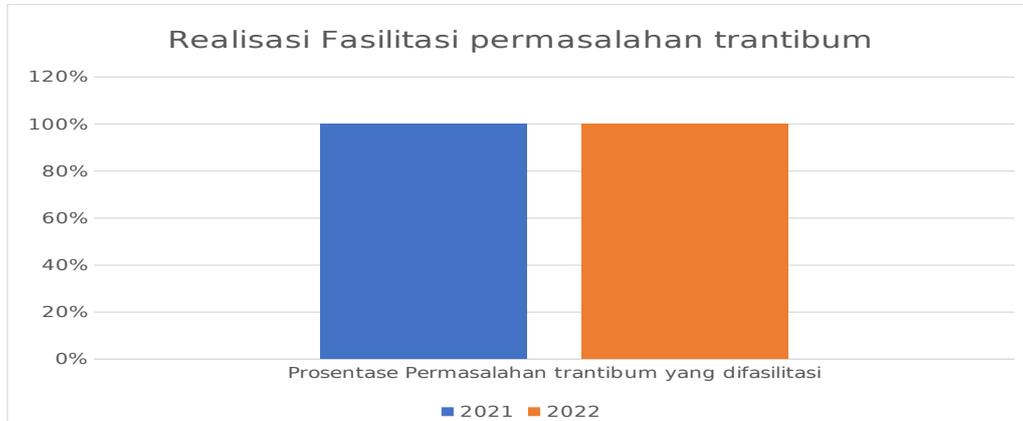
Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh sinergi yang baik antara satpol PP Kecamatan Sukodono Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022:

Tabel 3. 6 Perkembangan kinerja sasaran Kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022

1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	100%
---	--	---	------	------

Gambar 3. 2 Grafik Perkembangan kinerja sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2021-2022



Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah/tidak mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3. 7 Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	86%	100%	117,64%

Gambar 3. 3 Perkembangan Realisasi dibandingkan dengan target jangka menengah



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum adalah sebesar Rp. 126,401,860 dengan realisasi sebesar Rp. 44,912,200 Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 3. 8 Realisasi kinerja program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Ditangani	73	100	126,401,860	44,912,200
Total					126,401,860	44,912,200

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Meningkatkan sinergi dengan koramil, polsek, dan desa dalam rangka meningkatkan kondusifitas di wilayah kecamatan sukodono

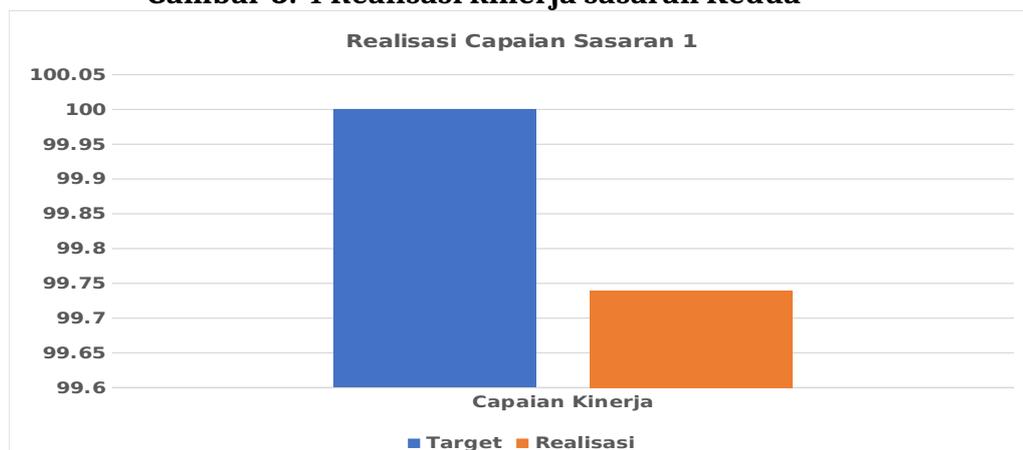
3.2.2. Sasaran Kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 99,74%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Tabel 3. 9 Realisasi kinerja sasaran 1 Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Sukodono	90,50(Sangat Baik)	98,85(Sangat Baik)	109,22%	6,384,0	6,083,2	95.29%
		Nilai SAKIP Kecamatan Sukodono	80,10(A)	80,49(A)	100,48%	12,063	69,976	
		Nilai RB	36,30	33,39	91,98%			
		Nilai IPP	4,51(A)	4,17(A-)	92,46%			
		Prosentase Penyerapan Anggaran	90%	94,13	104,58%			

Gambar 3. 4 Realisasi kinerja sasaran Kedua



Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator. Dengan definisi operasional dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Kedua beserta definisi operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Nilai SKM Kecamatan	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Nilai akan otomatis <i>generated by system</i> .	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Dengan range penilaian sebagai berikut a. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik c. 76,61 – 88,30 (B) = Baik d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik
Nilai SKM Kecamatan	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Nilai akan otomatis <i>generated by system</i>	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Dengan range penilaian sebagai berikut a. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik c. 76,61 – 88,30 (B) = Baik d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik
Nilai SAKIP Kecamatan Sukodono	1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30
Nilai RB	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform
Nilai IPP	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	Indeks penilaian sebagai berikut : a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Prosentase Penyerapan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran dilihat dari laporan realisasi anggaran pada aplikasi SIKSDA siksda.sidoarjokab.go.id	$\% \text{ Penyerapan} = \frac{\text{Total Realisasi}}{\text{Total Anggaran}} * 100$

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi yang mempergunakan booth mini MPP Kecamatan Sukodono dalam rangka menyamakan persepsi dalam usaha meraih *excellent service* pelayanan publik.
2. Melaksanakan pembinaan rutin kepada perangkat desa yang tugasnya melaksanakan pelayanan masyarakat tingkat desa.
3. Mempertahankan program pelayanan malam setiap hari senin dan rabu.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

2. Migrasi ke Identitas Kependudukan Digital yang menyebabkan blanko KTP tidak tersedia di kecamatan

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan juga mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh Peningkatan Nilai SKM, SAKIP, dan prosentase penyerapan anggaran Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022:

Tabel 3. 11 Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SKM Kecamatan Sukodono	97,89	98,85

kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Sukodono	78,61(BB)	80,49(A)
	Nilai RB	36,30	33,39
	Nilai IPP	4,03 (A-)	4,17 (A-)
	Prosentase Penyerapan Anggaran	94,04	94,13

Gambar 3. 5 Grafik Perkembangan kinerja Nilai SKM Tahun 2021-2022



Gambar 3. 6 Perkembangan kinerja Nilai SAKIP Tahun 2021-2022



Gambar 3. 7 Perkembangan kinerja Nilai RB Tahun 2021-2022



Gambar 3. 8 Perkembangan realisasi nilai IPP Tahun 2021-2022



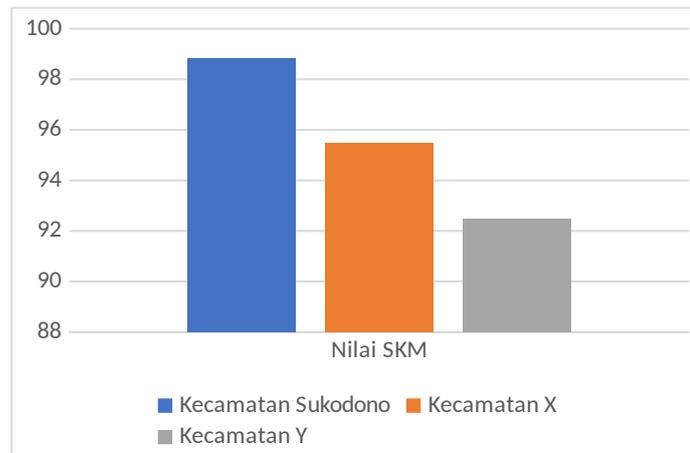
Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah/tidak mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada beberapa Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo yang tidak memiliki kelurahan, Capaian Kinerja pada sasaran 1 Kecamatan sukodono relative lebih tinggi . Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten.

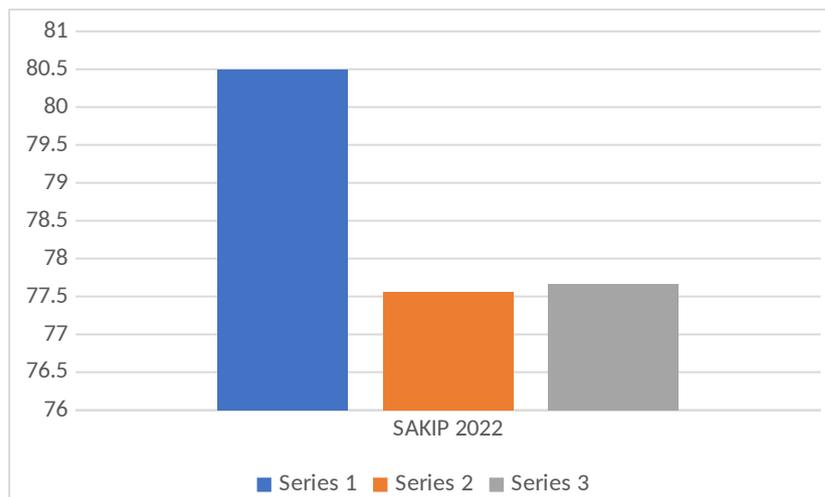
Tabel 3. 12 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kec. Sukodono	Kecamatan X	Kecamatan Y
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	98,85	95,46	92,49
		Nilai SAKIP	80,49(A)	77,56	77,67
		Nilai RB	33,39	33,99	29,64
		Nilai IPP	4,17 (A-)	4,16	3,45
		Prosentase Penyerapan Anggaran	94,13	93,45%	91,06

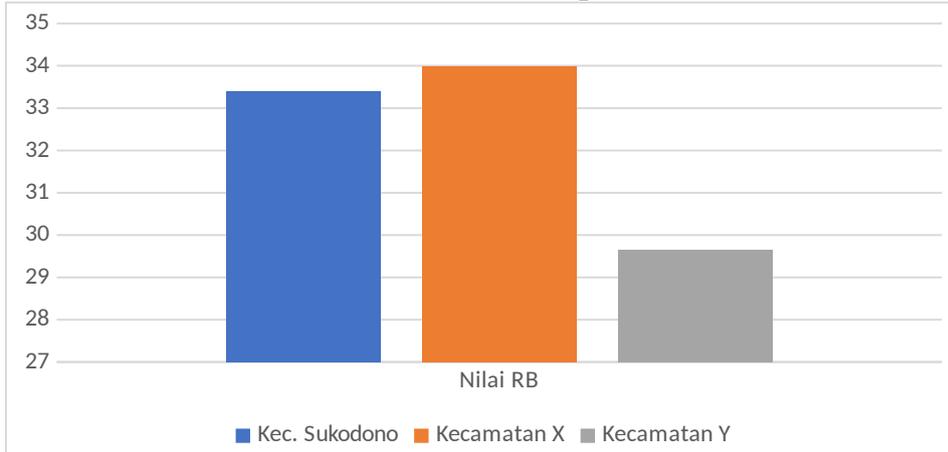
Gambar 3. 9 Komparasi Nilai SKM Tahun 2022



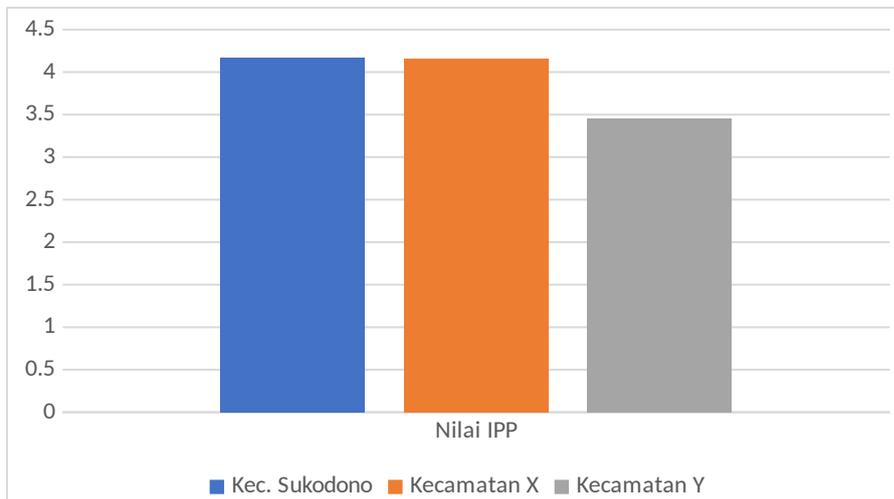
Gambar 3. 10 Komparasi Realisasi Nilai SAKIP 2022



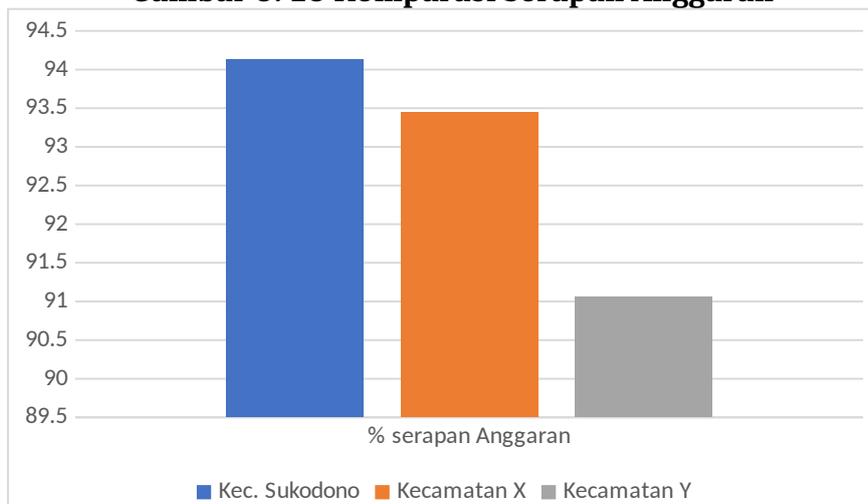
Gambar 3. 11 Komparasi Realisasi Nilai RB



Gambar 3. 12 Komparasi Nilai IPP



Gambar 3. 13 Komparasi Serapan Anggaran



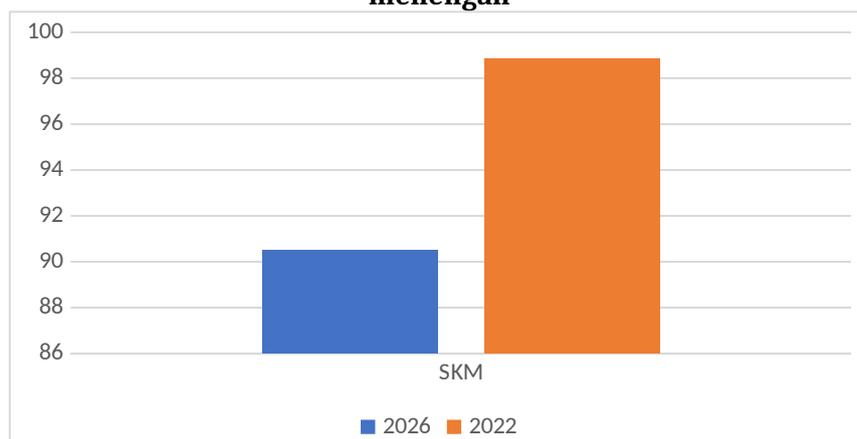
Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah/tidak mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka

menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

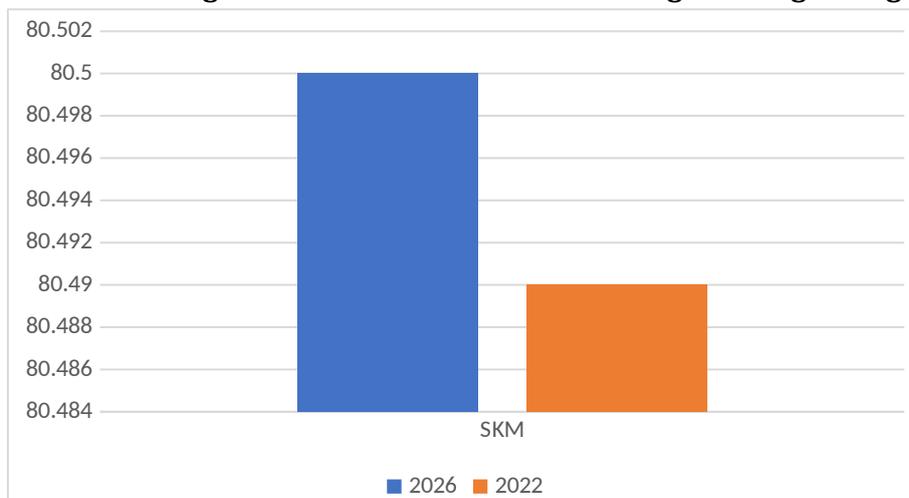
Tabel 3.4 Perkembangan kinerja sasaran Kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	90,50	98,85	109,23%
		Nilai SAKIP	80,50	80,49(A)	100,49%
		Nilai RB	36,30	33,39	91,98%
		Nilai IPP	4,51	4,17 (A-)	92,46%
		Prosentase Penyerapan Anggaran	90%	94,13	104,59%

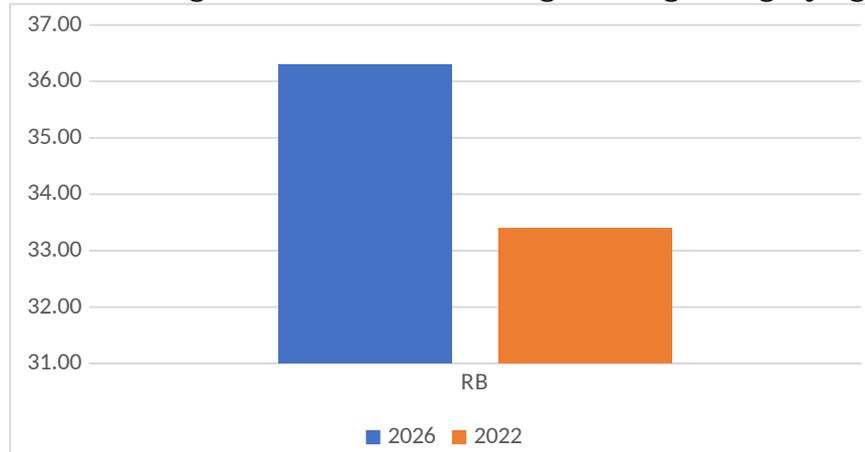
Gambar 3. 14 Perkembangan Realisasi SKM dibandingkan dengan target jangka menengah



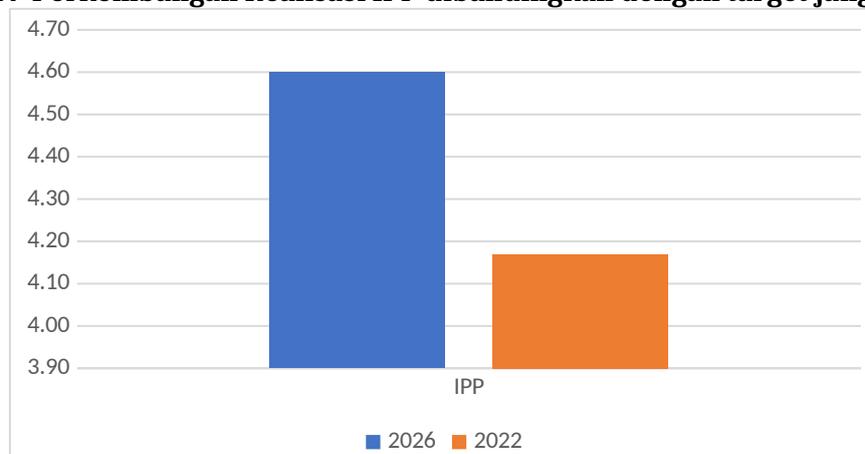
Gambar 3. 15 Perkembangan Realisasi Nilai SAKIP dibandingkan dengan target jangka menengah



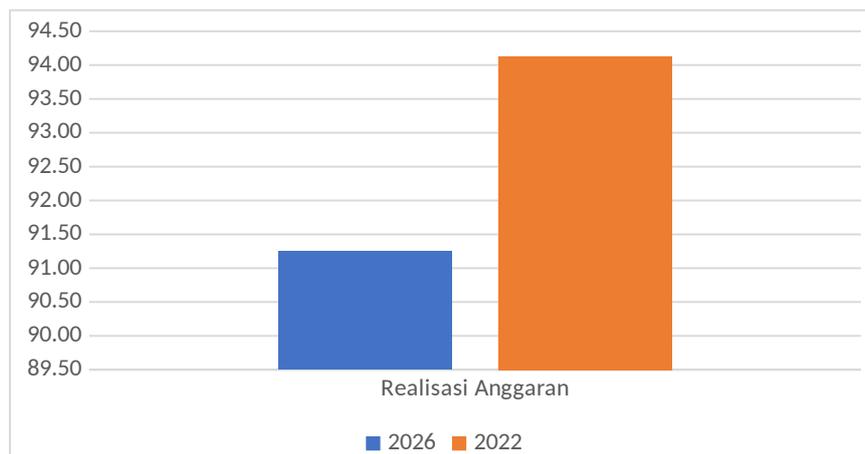
Gambar 3. 16 Perkembangan Realisasi RB dibandingkan dengan target jangka menengah



Gambar 3. 17 Perkembangan Realisasi IPP dibandingkan dengan target jangka menengah



Gambar 3. 18 Perkembangan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan target jangka menengah



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan adalah sebesar **Rp. 126,401,860** dengan realisasi sebesar **Rp. 44,912,200** Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkap realisasi sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 3. 13 Realisasi kinerja program dan kegiatan yang mendukung sasaran 2

No.	Sasaran	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
				T ¹⁾	R ¹⁾	% ¹⁾	T ¹⁾	R ¹⁾	% ¹⁾
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85	85	100.0 0%	5.276.601.173	5.142.267.676	97,45
2.		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Desa Yang Mendapat Pembinaan Tentang Lingkungan Hidup, Usaha Ekonomi Masyarakat, Dan PKL	100	100	100.0 0%	1.036.283.173	874.079.800	84,35
			Persentase Izin Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Yang Diterbitkan	100	100	100.0 0%			
			Persentase Pelayanan Kewenangan Kecamatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	86	86	100.0 0%			
3.		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang	80	80	100.0 0%	55.547.717	54.572.500	98,24

		Dilaksanakan Dengan Baik							
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu	100	100	100.0	15.580.000	12.350.000	79,27	

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Koordinasi dengan dinas yang menangani kependudukan perihal solusi atas blanko KTP
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat perihal migrasi e-KTP ke Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Tabel 3. 14 Realisasi kinerja dan Anggaran program berdasarkan sasaran

No.	Sasaran	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
				T [']	R [']	% [']	T [']	R [']	% [']
5.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Ditangani	73	100	136.9 9%	126.401.8 60	44.912.200	35,53
6.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85	85	100.0 0%	5.276.601 .173	5.142.267.6 76	97,45
7.		Program Penyelenggaraan	Persentase Desa Yang Mendapat	100	100	100.0 0%	1.036.283 .173	874.079.80 0	84,35

	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pembinaan Tentang Lingkungan Hidup, Usaha Ekonomi Masyarakat, Dan PKL						
		Persentase Izin Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Yang Diterbitkan	100	100	100.00%			
		Persentase Pelayanan Kewenangan Kecamatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	86	86	100.00%			
8.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	80	80	100.00%	55.547.717	54.572.500	98,24
9.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu	100	100	100.00%	15.580.000	12.350.000	79,27

3.3. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 15 Realisasi kinerja dan keuangan

No.	Sasaran	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
				T ¹⁾	R ¹⁾	% ¹⁾	T ¹⁾	R ¹⁾	% ¹⁾
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Ditangani	73	100	136.99%	126.401.860	44.912.200	35,53
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85	85	100.00%	5.276.601.173	5.142.267.676	97,45
3.		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Desa Yang Mendapat Pembinaan Tentang Lingkungan Hidup, Usaha Ekonomi Masyarakat, Dan PKL	100	100	100.00%	1.036.283.173	874.079.800	84,35
			Persentase Izin Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Yang Diterbitkan	100	100	100.00%			
			Persentase Pelayanan Kewenangan Kecamatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	86	86	100.00%			

4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	80	80	100.0 0%	55.547.717	54.572.500	98,24
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu	100	100	100.0 0%	15.580.000	12.350.000	79,27

1.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

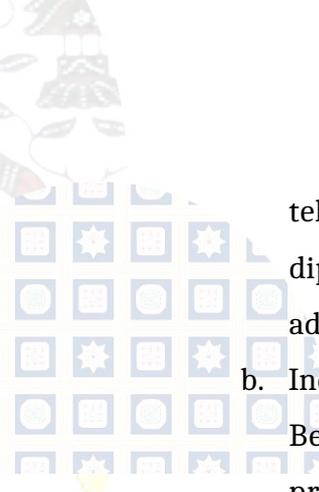
Tabel 3. 16 Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien ^{*)}
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan Trantibun yang difasilitasi	100%	35,53%	-64,47
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SKM	109,22%	95,29	-4,45
	Nilai SAKIP	100,48%		
	Nilai RB	91,98%		
	Nilai IPP	92,46%		
	Prosentase Penyerapan Anggaran	104,58%		

^{*)}: tingkat efisiensi = realisasi kinerja – realisasi anggaran

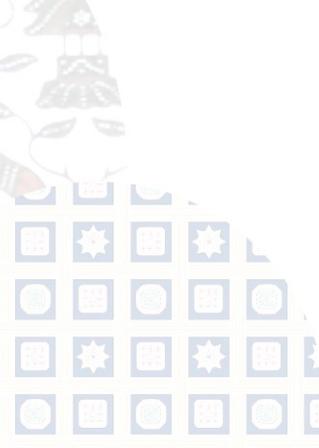
1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- a. Indikator Sasaran Prosentase Permasalahan Trantibun yang difasilitasi
Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, untuk indikator prosentase permasalahan trantibun dapat disampaikan bahwa indikator kinerja



telah tercapai 100%, dan penyerapan anggaran sebesar 35,53% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 281,44%. Efisiensi tersebut disebabkan antara lain adanya belanja barang dan jasa yang penyerapannya ditangguhkan.

- b. Indikator Sasaran Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, untuk indikator prosentase permasalahan trantibum dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 99,74%, dan penyerapan anggaran sebesar 95,29% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 104,66%. Efisiensi tersebut disebabkan antara lain selisih realisasi belanja berupa : selisih standar satuan harga (SSH), selisih Standar Biaya Umum (SBU)
- 



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu 2 Sasaran dengan kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran pertama, meskipun capaian sudah pada tingkat sangat baik, namun permasalahan ketentraman dan ketertiban umum akan selalu ada mengingat kondisi lingkungan, sosial, masyarakat yang dinamis. Yang bisa dioptimalkan untuk dilakukan adalah melakukan Tindakan preventif seperti pertemuan kerukunan antarumat beragama, pembinaan organisasi kepemudaan, operasi yustisi gabungan dengan polsek dan koramil.

Untuk sasaran kedua, kondisi capaian sudah tercapai sesuai dengan ekspektasi. Namun untuk peningkatan dapat dilaksanakan dengan Langkah – Langkah seperti pemenuhan dalam pengisian LKE SAKIP, RB, IPP dan pembinaan kepada seluruh aparatur Kecamatan Sukodono.

BAB V

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

[https://drive.google.com/file/d/1NDx0He9s7Y-61aVjJ_mdjBrLcUBKkpO/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/1NDx0He9s7Y-61aVjJ_mdjBrLcUBKkpO/view?usp=share_link)

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Daerah

[https://drive.google.com/file/d/1_ikysLVuRb8BDRjVGZk4ILCH0dk8hZyQ/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/1_ikysLVuRb8BDRjVGZk4ILCH0dk8hZyQ/view?usp=share_link)

B. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

[https://drive.google.com/file/d/1mxHiAjwOH09slcOa02_6eYd6vU5iFbpc/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/1mxHiAjwOH09slcOa02_6eYd6vU5iFbpc/view?usp=share_link)

C. Pohon Kinerja yang Menunjang Sasaran Kinerja 2022

[https://drive.google.com/file/d/1yMBBBmDbk1d7m51vCnSsc1Tg3t_YnAFV/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/1yMBBBmDbk1d7m51vCnSsc1Tg3t_YnAFV/view?usp=share_link)